**PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

# PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

# NOMOR 18 TAHUN 2025

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

# SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

# TAHUN 2026

**Sarilamak, September 2025**

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD disusun dengan sistematika:

a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:

a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

ndangkan di Sarilamak
da tanggal 30 Desember 2025
SE[illegible]ARIS DAERAH
[illegible]ULUH KOTA

[illegible] AZMAR
[illegible] KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
.....NOMOR..... 91

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... i

Daftar Tabel ..... ii

Daftar Gambar ..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... I-1

1.2 Landasan Hukum ..... I-10

1.3 Maksud dan Tujuan ..... I-12

1.4 Sistematika Penulisan ..... I-12

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD ..... II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ..... II-8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD ..... II-11

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II-16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II-22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD ..... III-2

3.3 Program dan Kegiatan ..... III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV-1

BAB V PENUTUP ..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Agenda penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ..... I-3

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... II-2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ..... II-9

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... II-18

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ..... II-22

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026..... III-3

Tabel 3.3.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten.....III-4

Tabel 3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 ..... III-7

Tabel 3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 ..... III-15

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 ..... IV-2

Tabel 4.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan , Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026.....IV-21

DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan sesuai system Perencanaan Pembangunan Nasional..... | 1.10 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Persiapan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD, Persiapan Penyusunan Rencanna Kerja Sekreatariat DPRD Tahun 2026 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Kalender Perencanaan RKPD dan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang telah disusun oleh Bapelitbang. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Persiapan Penyusunan Renja 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Penyusunan Rancangan Renja 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Perumusan Rancangan Akhir Renja 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Penetapan Renja PD 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Jenis / Tahapan Kegiatan | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja )

penyusunan rancangan awal Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD 2026 oleh tim Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD berdasarkan Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja ( Renja ) tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja ( Renja ) Tahun Lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.

II. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ( Renja )

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) merupakan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah . Penyajian Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ).

Selanjutnya , Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

III. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

IV. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir

Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD.

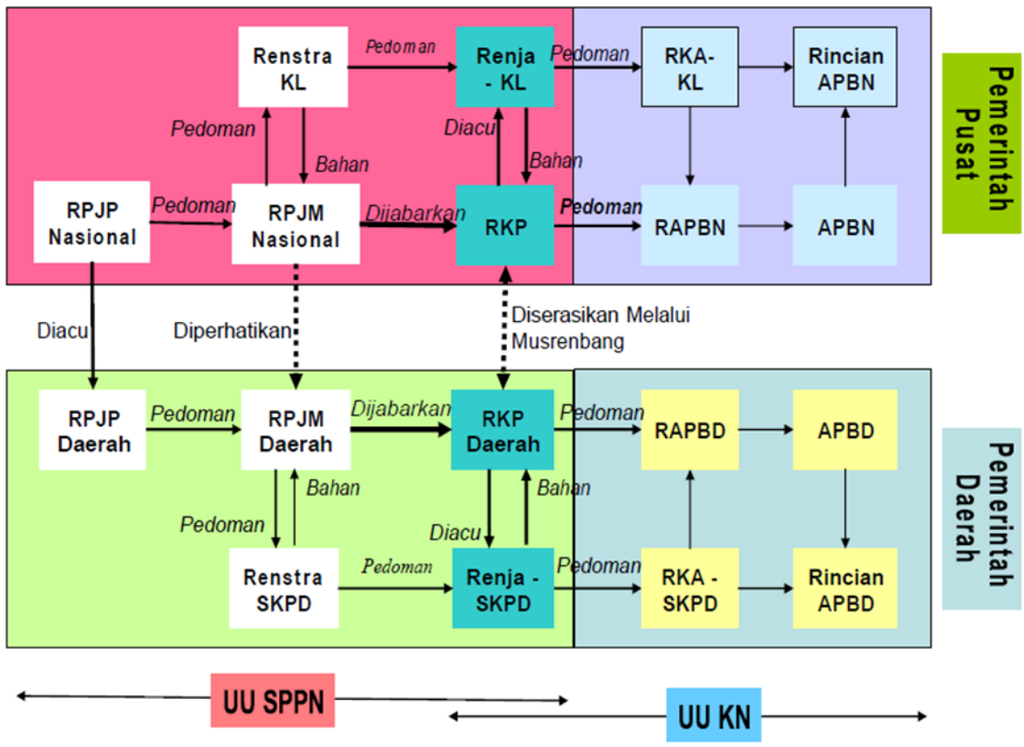
V. Penetapan

Dalam hal penetapan Rencana Kerja ( Renja ), Sekretariat DPRD menyerahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja ( Renja ) ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.1.1 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis dab Renja K/L Serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan APBD

Keterkaitan antara Rencana Kerja ( Renja ) dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran ( RAPBD/APBD ) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun antara pemerintah dengan legislatif yaitu kebijakan umum APBD ( KUA ) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ).

Gambar.1.1
Keterkaitan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Sesuai
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional




1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20025 – 2045;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2026.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Tahun Lalu
Berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Memuat telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja ( Renja )

Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2024 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yag dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6 ) | 9 | 10= 5+7+9 | 11= ( 10/4 ) |
| | | | | | | | | | | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Pesentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 91,52% | 91,52% | 100,00% | 97,17% | 97,17% |
| **4.02.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.01.2.05** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **66,66%** | 66,66% | **100,00%** | 88,89% | 88,89% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6 ) | 9 | 10= 5+7+9 | 11= ( 10/4 ) |
| | | | | | | | | | | |
| **4.02.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **80,00%** | 80% | **100,00%** | 93,33% | 93,33% |
| **4.02.01.2.07** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | **Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6 ) | 9 | 10= 5+7+9 | 11= ( 10/4 ) |
| | | | | | | | | | | |
| **4.02.01.2.15** | **Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **76,98%** | 76,98% | **100,00%** | 92,33% | 92,33% |
| **4.02.01.2.16** | **Kegiatan Layanan Administrasi DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **80,99%** | 80,99% | **100,00%** | 93,66% | 93,66% |
| **4.02.02.2.01** | **Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **51,96%** | 51,96% | **100,00%** | 83,99% | 83,99% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6 ) | 9 | 10= 5+7+9 | 11= ( 10/4 ) |
| | | | | | | | | | | |
| **4.02.02.2.02** | **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.02.2.03** | **Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.02.2.04** | **Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **99,66%** | 99,66% | **100,00%** | 99,89% | 99,89% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6 ) | 9 | 10= 5+7+9 | 11= ( 10/4 ) |
| **4.02.02.2.05** | **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **96,30%** | 96,30% | **100,00%** | 98,77% | 98,77% |
| **4.02.02.2.06** | **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **0,00** | 0,00 | **100,00%** | 66,67% | 66,67% |
| **4.02.02.2.07** | **Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100%** | 100% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |
| **4.02.02.2.08** | **Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | **100,00%** | 100,00% | 100,00% |

Selanjutnya evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 91.52%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 91.52%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
    a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
    f) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 80.99%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 80.99%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
    a) Pembahasan Kebijakan Anggaran;
    b) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
    c) Peningkatan Kapasitas DPRD;
    d) Pembahasan Kerjasama Daerah; dan
    e) Fasilitasi Tugas DPRD.

II. Program dan kegiatan yang <u>tidak</u> memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, ada kegiatan yang pencapaian targetnya kurang dari 100% diantaranya :
    a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    b) Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
    c) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Pada Sub kegiatan tersebut di atas, belum tercapainya target realisasi yang direncanakan disebabkan karena intesitas pekerjaan yang tinggi sehingga kegiatan tidak terlaksana.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada umumnya semua kegiatan telah mencapai target, hanya beberapa kegiatan yang belum mencapai target di antaranya ;

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
b) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
c) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2 ( TC-30 )**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

| No | Indikator | SPM / standar nasional | IKK/IKD | IKU KD | IKU PD (Sekretariat DPRD) | Target Restra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun 2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | |
| -1 | -2 | -3 | | | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | | -11 | -12 | | -13 |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | | V | | | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan ( RPJM ) maupun dokumen rencana tahunan ( RKPD ) | | V | | | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai |
| 3 | Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD | | V | | | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Tercapai |
| 4 | Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan(% | | | | V | 80 | 80% | 80 | 85 | 94,02 | Tidak Ada Data | 94,02 | 94,02 | Tercapai |
| 5 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | | | | V | 55 | 60 | 65 | 70 | 72,3 | Tidak Ada Data | 70 | 70 | Tercapai |

| No | Indikator | SPM / standar nasional | IKK/IKD | IKU KD | IKU PD (Sekretariat DPRD) | Target Restra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun 2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | Tahun 2024 (thn n-2) | Tahun2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n) | Tahun 2027 (thn n+1) | |
| -1 | -2 | -3 | | | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | | -11 | -12 | | -13 |
| 6 | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | | | | V | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 80% | 80% | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 80% | 80% | Belum Tercapai |
| 7 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | | | | V | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 65 | 70 | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 70 | 70 | Belum Tercapai |
| 8 | Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N | | | | V | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 9 | 9 | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 9 | 9 | Belum Tercapai |
| 9 | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N | | | | V | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 9 | 9 | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 9 | 9 | Belum Tercapai |
| 10 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | V | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 100% | 100% | Tidak Ada Data | Tidak Ada Data | 100% | 100% | Belum Tercapai |

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat berdasarkan table 2.2 sesuai dengan IKD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
b. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasiltasi kegiatan sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94.11% atau sebanyak 32 orang menyatakan puas atas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dan untuk nilai akuntanilitas Kinerja Sekretariat DPRD juga telah mencapai target 72.30.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### 2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholders*nya.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah persidangan.
2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.
3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara.Sekretariat DPRD telah melayani seluruh

proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal,Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.
5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group.*

Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisioner dengan seluruh anggota DPRD,dimana untuk tahun 2025 ini, dari 34 orang anggota DPRD, 32 orang ( 94.11%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, adapun kelemahan itu antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.

5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparataur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maupun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

2.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melakasanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat / Komisi / Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.

2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.

Merujuk pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
3. Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
4. Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN maupun THL dalam memfasiltasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasiltasi kebutuhan informasi anggota DPR
3. Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan

konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Sedangkan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Rekomendasi
   Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD. Peningkatan Kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan DPRD.
b. Kebijakan Strategis
   1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
   2. Meningkatkan Kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
   3. Menyempurnakan system dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi;
   4. Pembaruan saran dan prasarana penunjang operasional;
   5. Penambahan daya dukung financial dan non financial;
   6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
   7. Hasil Penjadwalan Badan Musyawarah di sosialisasikan ke semua pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD;
   8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan
      kegiatan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

## Tabel 2.4
## Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
## Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Sekretariat DPRD | **100** | **45.078.050.749** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Sekretariat DPRD | **100** | **27.841.501.721** | . |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 340.177.800 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | **100** | **170.345.400** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi Keuangan | Sekretariat DPRD | 100 | 4.714.113.075 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi Keuangan | Sekretariat DPRD | **100** | **5.411.169.421** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 825.100.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | **100** | **402.800.000** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 2.422.600.000 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sekretariat DPRD | **100** | **2.172.657.400** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Sekretariat DPRD | 100 | 1.100.000.000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Sekretariat DPRD | **100** | **3.161.968.000** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 541.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Sekretariat DPRD | **100** | **759.515.000** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik | Sekretariat DPRD | 100 | 3.450.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik | Sekretariat DPRD | **100** | **3.104.701.000** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.** | **Program /Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 30.033.484.874 | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Sekretariat DPRD | **100** | **12.052.572.500** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 1.306.325.000 | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Sekretariat DPRD | **100** | **605.773.000** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** | Sekretariat DPRD | **100** | **32.503.114.381** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** | Sekretariat DPRD | **100** | **14.928.789.100** | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 6.940.500.000 | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 4.480.464.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Sekretariat DPRD | 100 | 1.915.157.085 | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Sekretariat DPRD | 100 | 180.102.900 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Sekretariat DPRD | 100 | 1.541.106.888 | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Sekretariat DPRD | 100 | 295.268.700 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 6.001.666.500 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 2.912.244.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Sekretariat DPRD | 100 | 1.783.223.700 | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Sekretariat DPRD | 100 | 1.279.195.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.** | **Program /Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 25.000.000 | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 62.640.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 315.000.000 | Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Sekretariat DPRD | 100 | 75.271.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 13.981.460.208 | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Sekretariat DPRD | 100 | 5.643.602.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | **Jumlah** | | | | **77.581.165.130** | **Jumlah** | | | | **42.770.290.821** | |

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026, dimana pada rancangan awal RKPD tahun 2026 pagu indikatif yang tersedia adalah sebesar Rp 77.581.165.130,- sedangkan kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 42.770.290.821,-.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 mengakomodir usulan dari alat kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **N I H I L** | | | | |
| | | | | | |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan Awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana Sesuai dengan Visi Misi RPJPN 2025-2045 dimana Visinya " Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan". Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 Pendapatan Perkapita Sesuai dengan Negara Maju, Kemiskinan menuju Nol persen dan ketimpangan berkurang, Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat, Daya Saing sumber daya manusia meningkat, Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission.* Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, memantapkan Supremasi Hukum Satabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan Delapan misi ( Agenda ) pembangunan 2045 terdiri atas:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi hukum Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 termasuk 8 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 ( lima ) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapai nya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Sekretariat DPRD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 berdasarkan Visi Misi Kepala daerah

> *"Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".*

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, Lima Puluh Kota juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti, pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota lima tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata. Bermatabat maksudnya Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisplinanannya, berangkat dari akar budaya minang "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dalam arti yang seluas-luasnya dengan menjaga pluralitas budaya yang ada di sekitar kita. Maju maksudnya Perekonomian dan masyarakat yang berdaya saing dengan kualitas hidup yang baik, kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Sejahtera maksudnya Peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didukung pemerataan pembangunan yang inklusif serta tersedianya sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Berkelanjutan maksudnyaTerwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim.

Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Bermatabat , Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang Dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 8 Misi Pembangunan Daerah, untuk Sekretariat DPRD ada pada misi ke 2 ” Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari misi ke dua Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran :
   1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
   1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel, dengan sasaran :
   2.1 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
3. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah, dengan sasaran :
   3.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dan Sasaran berdasarkan Inmendagri Nomor 1 tahun 2025 sebagai berikut : “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Tahun 2025-2029

| Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target tahun | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | | Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | $= \frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas}}{Jumlah\ Anggota\ DPRD} X100\%$ |
| | | 1. Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | 1. Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N<br>2. Persentase penetapan Ranperda Tahun N | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | $= \frac{\text{Jumlah Ranperda}}{Jumlah\ Penetapan\ Ranperda} x100\%$ |
| | | 2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | $= \frac{Jumlah\ Realisasi\ Anggaran}{\text{Jumlah Anggaran}} X\ 100\%$ |
| | | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD | Nilai Sakip Sekretariat DPRD | 65 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | NILAI SAKIP |

## 3.3 Program dan Kegiatan

### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan untuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.

Tabel 3.3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | Belum tercapai | Belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut | Ketersediaan dan peningkatan pagu anggaran yang memadai sesuai kebutuhan riil lembaga DPRD |
| 2 | Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota | Belum tercapai | Belum tercapai indikator penyelenggaraan program | 1. Penyediaan anggaran operasional yang proporsional terhadap beban kerja Sekretariat DPRD.<br>2. SDM aparatur yang kompeten dan memahami tata kelola administrasi perkantoran |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | modern |
| | Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Belum tercapai | belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut | Alokasi anggaran yang memadai untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah |
| 3 | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Belum tercapai | Belum tercapai indikator penyelenggaraan program | Tersedianya anggaran yang cukup untuk kegiatan rapat, reses, bimtek, dan fasilitasi tugas DPRD |
| | Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Belum tercapai | belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut | Penganggaran yang sesuai standar kebutuhan penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan |

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, untuk tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan 2 program,17 kegiatan dan 74 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan uraian program dan kegiatan seperti tersebut diatas, dapat di urai menjadi sub-sub kegiatan. Ringkasan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2026

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD<br>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD<br>7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya<br>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | 4. Administrasi Umum Perangkat | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | Daerah | Kantor<br>2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan<br>4. Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya<br>2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik<br>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Lainnya<br>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | |
| | | 8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD<br>2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD |
| | | 9. Layanan Administrasi DPRD | 1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD<br>2. Fasilitasi Fraksi DPRD<br>3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD<br>4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD |
| 2. | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>3. Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan<br>4. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik<br>5. Penyusunan Tata Tertib DPRD |
| | | 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran | 1.Pembahasan KUA dan PPAS<br>2. Pembahasan Perubahan KUA dan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Perubahan PPAS<br>3. Pembahasan APBD<br>4. Pembahasan APBD Perubahan<br>5. Pembahasan Laporan Semester<br>6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
| | | 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>7. Pengawasan Penggunaan Anggaran<br>8.Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
| | | 4. Peningkatan Kapasitas DPRD | 1. Pendalaman Tugas DPRD<br>2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi<br>4. Penyelenggaraan |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Hubungan Masyarakat<br>5. Penyusunan Program Kerja DPRD<br>6. Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| | | 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah<br>2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD<br>3. Pelaksanaan Reses |
| | | 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1. Penyusunan Kode Etik DPRD<br>2. Pengawasan Kode Etik DPRD |
| | | 7. Pembahasan Kerjasama Daerah | 1. Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah<br>2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi |
| | | 8. Fasilitasi Tugas DPRD | 1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD<br>2. Penyusunan laporan Kinerja DPRD<br>3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah<br>4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD<br>5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus |
| | 2 | 17 | 74 |

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2026 menjadi 2 program 17 kegiatan dan 74 Sub kegiatan

3.3.3 Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncankan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 mendasarkan pada

rencana kerja Sekretariat DPRD. mendasarkan pada hal tersebut, Pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2026 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

## Tabel 3.3.3
## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
## Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **4** | **2** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak** | **100** | **27.841.501.721** | **100** | | **100** | **27.841.501.721** | |
| **4** | **2** | **1** | **2.01** | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 1.703.454.000 | 100 | | 100 | 1.703.454.000 | |
| **4** | **2** | **1** | **2.02** | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi Keuangan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 5.411.169.421 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 5.411.169.421 | |
| **4** | **2** | **1** | **2.05** | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 402.800.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 402.800.000 | |
| **4** | **2** | **1** | **2.06** | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 2.172.657.400 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 2.172.657.400 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 3.161.968.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 3.161.968.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 759.515.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 759.515.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 3.104.701.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 3.104.701.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 12.052.572.500 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 12.052.572.500 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 605.773.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 605.773.000 | |
| **4** | **2** | **2** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** | **Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak** | **100** | **14.928.789.100** | **Dana Transfer Umum- DAU** | | **100** | **14.928.789.100** | |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 4.480.464.500 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 4.480.464.500 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 180.102.900 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 180.102.900 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 295.268.700 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 295.268.700 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 2.912.244.100 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 2.912.244.100 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 1.279.195.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 1.279.195.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.06 | | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 62.640.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 62.640.000 | |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.07 | | Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 752.714.000 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 752.714.000 | |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 100 | 5.643.602.500 | Dana Transfer Umum- DAU | | 100 | 5.643.602.500 | |
| | | | | | **Jumlah** | | | | **42.770.290.821** | | | | **42.770.290.821** | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini disusun mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sektretariat DPRD Tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 serta visi dan misi Kepala Daerah.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SEKRETARIAT DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 42.770.290.821,00 | | | | | | | 42.770.290.821,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 42.770.290.821,00 | | | | | | | 42.770.290.821,00 | |
| | - | - | | | | | | 42.770.290.821,00 | | | | | | | 42.770.290.821,00 | |
| 1. | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | *Persentase terselenggaranya* Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | - | | | 100 | 14.928.789.100,00 | | | | | | 100 | 14.928.789.100,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase terselenggaranya Kegiatan* Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | - | | | 100 | 4.480.464.5000,00 | | | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 100 | 4.480.464.5000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 7.903.400,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 7.903.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 9 Ranperda | 4.343.857.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 9 Ranperda | 4.343.857.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 12 per UU | 30.245.600,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 12 per UU | 30.245.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 3 Dokumen | 63.036.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Dokumen | 63.036.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 35.422.500,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 35.422.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Persentase terselenggaranya* Pembahasan Kebijakan Anggaran | - | | | 100 | 180.102.900,00 | | | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 100 | 180.102.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 16.900.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 2 Dokumen | 16.900.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 2 Dokumen | 35.530.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 2 Dokumen | 35.530.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 32.650.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 32.650.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 30.522.900,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 30.522.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester* | | | | 1 Dokumen | 19.500.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 19.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Persentase terselenggaranya Kegiatan* Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | | | 100 | 295.268.700,00 | | | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 100 | 295.268.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 3 Laporan | 129.050.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Laporan | 129.050.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 3 Laporan | 14.325.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Laporan | 14.325.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 3 Laporan | 35.080.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Laporan | 35.080.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 3 Laporan | 11.392.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Laporan | 11.392.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam* | | | | 3 Laporan | 35.840..000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Laporan | 35.840..000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan* | | | | 3 Dokumen | 2.718.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Dokumen | 2.718.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OP4 TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran* | | | | 3 Dokumen | 55.110.000,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 3 Dokumen | 55.110.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daera | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 11.753.700,00 | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 1 Laporan | 11.753.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Persentase terselenggaranya Kegiatan* Peningkatan Kapasitas DPRD | - | | | 100 | 2.912.244.100,00 | | | - | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengembangan Masyarakat Madani | - | 100 | 2.912.244.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4.1
Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah ( Renja OPD )
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 27.841.501.721 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | 27.841.501.721 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 170.345.400 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | | 100 | 170.345.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencana | Set.DPRD Kab.Lima | 1 dokumen | 35.848.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan | Set.DPRD Kab.Li | 1 dokumen | 35.848.000 | Adanya perubahan indicator |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Perangkat Daerah | an Perangkat Daerah | Puluh Kota | | | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | ma Puluh Kota | | | akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 28.009.500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 28.009.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 25.052.500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 25.052.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 35.252.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 35.252.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 21.388.400 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 dokumen | 21.388.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja | Set.DPRD Kab.Lima Puluh | 1 Laporan | 12.764.900 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | Set.DPRD Kab.Lima | 1 Laporan | 12.764.900 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota | | | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Puluh Kota | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Laporan | 12.030.100 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Laporan | 12.030.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase tertib administrasi | | 100 | 5.411.169.421 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase tertib administrasi Keuangan | | 100 | 5.411.169.421 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Daerah | Keuangan | | | | Daerah | | | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 35 orang/bulan | 4.245.429.321 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangannya | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 35 orang/ bulan | 4.245.429.321 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 12 Dokumen | 1.042.368.500 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 12 Dokumen | 1.042.368.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 4800 Dokumen | 71.573.500 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 4800 Dokumen | 71.573.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | SKPD | | | | | SKPD | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Laporan | 13.674.100 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Laporan | 13.674.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 3 dokumen | 12.633.800 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 3 dokumen | 12.633.800 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | an | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 13 Laporan | 12.745.100 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 13 Laporan | 12.745.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Dokumen | 12.745.100 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Dokumen | 12.745.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 402.800.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 | 402.800.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Paket | 146.200.000 | Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 1 Paket | 146.200.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 8 orang | 76.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 8 orang | 76.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 18 orang | 180.100.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota | 18 orang | 180.100.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 2.172.657.400 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 | 2.172.657.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Paket | 1.492.915.900 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Paket | 1.492.915.900 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket | Kab. Lima | 1 Paket | 92.944.000 | Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang | Kab. Lima | 1 Paket | 92.944.000 | Adanya perubahan |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan | Puluh Kota, Harau, Sarilama k | | | Cetakan dan Penggandaan | Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Puluh Kota, Harau, Sarilam ak | | | indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-unda ngan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilama k | 300 Dokume n | 23.525.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-un dangan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-un dangan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilam ak | 300 Dokum en | 23.525.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilama k | 12 Laporan | 322.360.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilam ak | 12 Lapora n | 322.360.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilama k | 12 Laporan | 240.912.500 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilam ak | 12 Lapora n | 240.912.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | SKPD | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | | 100 | 3.161.968.000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan | | 100 | 3.161.968.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | | | 3.058.559.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraa dinas jabatan yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 0 | 3.058.559.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 unit | 103.409.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 unit | 103.409.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa | Persentase Ketersedia | | 100 | 759.515.000 | Kegiatan Penyediaan | Persentase Ketersediaan | | 100 | 759.515.000 | Adanya perubahan |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | an Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | | | | indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 5.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 5.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 24 Laporan | 209.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 24 Laporan | 209.200.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 544.815.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 544.815.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | disediakan | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik | | 100 | 3.104.701.000 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik | | 100 | 3.104.701.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua kelurahan | 16 Unit | 482.800.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua kelurahan | 16 Unit | 482.800.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarka | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 14 Unit | 230.300.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 14 Unit | 230.300.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | n pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Unit | 2.081.431.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Unit | 2.081.431.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Unit | 310.170.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Unit | 310.170.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan | | 100 | 12.052.572.500 | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan | | 100 | 12.052.572.500 | Adanya perubahan indicator akibat |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | DPRD | Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 35 orang/bulan | 11.680.947.500 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 35 orang/ bulan | 11.680.947.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Paket | 319.125.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Paket | 319.125.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 35 orang | 52.500.000 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check UP DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 35 orang | 52.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Persentase Terselenggaranya | | 100 | 605.773.000 | Kegiatan Layanan Administrasi | Persentase Terselenggaranya Kegiatan | | 100 | 605.773.000 | Adanya perubahan indicator |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | | | | DPRD | Layanan Administrasi DPRD | | | | akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 9.500.000 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 9.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 13.256.000 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 13.256.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 279.385.000 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 279.385.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Paket | 303.632.000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Paket | 303.632.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | 100 | 14.928.789.100 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | 100 | 14.928.789.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan | | 100 | 4.480.464.500 | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | 100 | 4.480.464.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | DPRD | | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Dokumen | 7.903.400 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Dokumen | 7.903.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 9 ranperda | 4.343.857.000 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 13 Dokumen | 4.343.857.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Peruu | 30.245.600 | Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 5 Dokumen | 30.245.600 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 63.036.000 | Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 63.036.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 35.422.500 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 35.422.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 100 | 180.102.900 | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | | 100 | 180.102.900 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, | 2 dokumen | 16.900.000 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, | 2 dokumen | 16.900.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Sarilamak | | | | | Sarilamak | | | nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 dokumen | 35.530.000 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 dokumen | 35.530.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 32.650.000 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 32.650.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 30.522.900 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 30.522.900 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan | Kab. Lima Puluh Kota, | 1 dokumen | 19.500.000 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan | Kab. Lima Puluh Kota, | 1 dokumen | 19.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester | Harau, Sarilamak | | | | Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester | Harau, Sarilamak | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 45.000.000 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 45.000.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | | 100 | 295.268.700 | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan | | 100 | 295.268.700 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 30 orang | 129.050.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Laporan | 129.050.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Hukum | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 14.325.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 14.325.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 35.080.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 35.080.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 11.392.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 11.392.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 35.840.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 35.840.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 2.718.000 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 2.718.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 laporan | 55.110.000 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 55.110.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 laporan | 11.753.700 | Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Dokumen | 11.753.700 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | | 100 | 2.912.244.100 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | | 100 | 2.912.244.100 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 1.152.979.600 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 2 Dokumen | 1.152.979.600 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan | Kab. Lima Puluh Kota, | 24 Orang | 132.354.000 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kab. Lima Puluh Kota, | 0 | 132.354.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Tim Ahli | Harau, Sarilamak | | | | | Harau, Sarilamak | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 8 Orang | 253.200.000 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 8 Orang | 253.200.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 77.500.000 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 77.500.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 17.946.500 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 0 dokumen | 17.946.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan | Kab. Lima Puluh Kota, | 3 Dokumen | 1.278.264.000 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan | Kab. Lima Puluh Kota, | 3 dokumen | 1.278.264.000 | Adanya perubahan indicator akibat |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Produk Hukum Daerah , Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Harau, Sarilamak | | | | dokumentasi DPRD | Harau, Sarilamak | | | pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 100 | 1.279.195.000 | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | 100 | 1.279.195.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 436.830.000 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Laporan | 436.830.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, | 12 Dokumen | 103.980.000 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, | 12 Dokumen | 103.980.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Sarilamak | | | | | Sarilamak | | | nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 738.385.000 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 3 Dokumen | 738.385.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | 100 | 62.640.000 | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | 100 | 62.640.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 42.640.000 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 dokumen | 42.640.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode | Kab. Lima Puluh Kota, | 1 Laporan | 20.000.000 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, | 1 Laporan | 20.000.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | Etik DPRD | Harau, Sarilamak | | | | | Harau, Sarilamak | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | | 100 | 75.271.400 | Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah | | 100 | 75.271.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Dokumen | 59.800.000 | Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Dokumen | 59.800.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 15.471.400 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 15.471.400 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | | 100 | 5.643.602.500 | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | | 100 | 5.643.602.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 4.364.807.000 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 4.364.807.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Penyusunan laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Laporan | 14.325.000 | Penyusunan laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi , Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 1 Laporan | 14.325.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana | Kab. Lima Puluh Kota, | 12 Dokumen | 34.473.500 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan | Kab. Lima Puluh Kota, | 12 Dokumen | 34.473.500 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhira |

| No | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target 2026 | Pagu Indikatif (Rp. | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | an Tugas Badan Musyawarah | Harau, Sarilamak | | | | Tugas Badan Musyawarah | Harau, Sarilamak | | | n nomenklatur pada SIPD RI |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 1.229.997.000 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak | 12 Dokumen | 1.229.997.000 | Adanya perubahan indicator akibat pemutakhiran nomenklatur pada SIPD RI |
| | Jumlah | | | | 42.770.290.821 | Jumlah | | | | 42.770.290.821 | |

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026

| No | Bidang Urusan | Tahun 2026 | | Total Pagu ( Rp.) | Tahun 2027 | | Total Pagu Indikatif ( Rp.) | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | | | Jumlah | | | |
| | | Program | Kegiatan | | Program | Kegiatan | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | 2 | 17 | 42.770.290.821,00 | 2 | 17 | 42.770.290.821,00 | |
| | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Sektretariat DPRD tahun 2026 adalah sebesar Rp. 42.770.290.821,00 untuk 2 program dan 17 kegiatan, sedangkan untuk pagu tahun 2027 diperkirakan juga akan sama sebesar Rp. 42.770.290.821,00.

# BAB V

# PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Selain itu, penyusunan Renja Sekretariat DPRD juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut

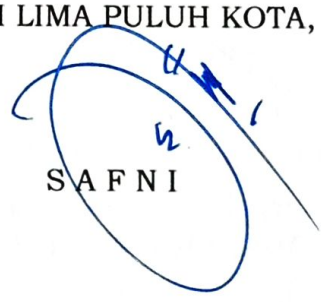
merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Dengan penyusunan dokumen perencaaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



S A F N I

# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**
**NOMOR 050/437/BUP-LK/XII/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah melityputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
   a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
   b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
   c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
   a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;

d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;

e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**
NOMOR : 050/457/BUP-LK/ XII /2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **1.** | **SEKRETARIAT DAERAH** | |
| | Sekretaris Daerah | Ketua |
| | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Ketua I |
| | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan | Wakil Ketua II |
| | Asisten Administrasi Umum | Wakil Ketua III |
| | Kabag Perencanaan Dan Keuangan | Sekretaris |
| | Kabag Pemerintahan | Anggota |
| | Kabag Hukum | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Hukum | Anggota |
| | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda | Anggota |
| | Kasubag Protokol | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Anggota |
| | | |
| **2.** | **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** | |
| | Sekretaris DPRD | Ketua |
| | Kabag Umum dan Keuangan | Sekretaris |
| | Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan | Anggota |
| | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan | Anggota |
| | Fungsional Pranata Humas | Anggota |
| | Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Anggota |
| | | |
| **3.** | **INSPEKTORAT** | |
| | Inspektur | Ketua |
| | Sekretariat | Sekretaris |
| | Inspektur Pembantu Wilayah I | Anggota |

Dipindai dengan CamScanner

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Inspektur Pembantu Wilayah II | Anggota |
| | Inspektur Pembantu Wilayah III | Anggota |
| | Inspektur Pembantu Wilayah IV | Anggota |
| | Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada Inspektorat | Anggota |
| | | |
| **4.** | **DINAS KESEHATAN** | |
| | Kepala Dinas Kesehatan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Kesehatan | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | Anggota |
| | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | Anggota |
| | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kepala Sub Bagian Keungan dan Pengelolaan Aset | Anggota |
| | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi | Anggota |
| | Fungsional Sanitarian | Anggota |
| | Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| | | |
| **5.** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | |
| | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretaris |
| | Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar | Anggota |
| | Kabid Pembinaan PAUD dan PNF | Anggota |
| | Kabid Pembinaan Ketenagaan | Anggota |
| | Kabid Kebudayaan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| | | |
| **6.** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | |
| | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Ketua |
| | Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Bina Marga | Anggota |
| | Kepala Bidang Cipta Karya | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kepala Bidang Sumber Daya Air | Anggota |
| | Kepala Bidang Jasa Konstruksi | Anggota |
| | Kepala Bidang Tata Ruang | Anggota |
| | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang | Anggota |
| | Kepala Seksi Pertanahan | Anggota |
| | Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| | | |
| **7.** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | |
| | Kepala Satpol PP | Ketua |
| | Sekretaris Satpol PP | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Trantib | Anggota |
| | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Bidang PPUD | Anggota |
| | Kepala Bidang SDA | Anggota |
| | Kasubag Program & Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum & Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada Satpol PP | Anggota |
| | | |
| **8.** | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN** | |
| | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Sekretaris |
| | Kabid Pencegahan | Anggota |
| | Kabid Pemadam Dan Penyelamatan | Anggota |
| | Kabid Sarana Dan Prasarana | Anggota |
| | Kasubag Umum Dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Perencanaan Dan Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran | Anggota |
| | | |
| **9.** | **DINAS SOSIAL** | |
| | Kepala Dinas Sosial | Ketua |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Sekretaris Dinas Sosial | Sekretaris |
| | Kabid Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| | Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial | Anggota |
| | Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial | Anggota |
| | Fungsional Penyuluh Sosial | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Sosial | Anggota |
| | | |
| **10.** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | |
| | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sekretaris |
| | Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Anggota |
| | Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Anggota |
| | Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| | | |
| **11.** | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | |
| | Kepala DPPKBPPPA | Ketua |
| | Sekretaris DPPKBPPPA | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota |
| | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan | Anggota |
| | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan | Anggota |
| | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Pelaksana pada DPPKBPPPA | Anggota |
| | | |
| **12.** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | |
| | Kepala DPMPTSP | Ketua |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Sekretaris DPMPTSP | Sekretaris |
| | Kabid Pelayanan Terpadu | Anggota |
| | Kabid Promosi | Anggota |
| | Kabid Perencanaan dan Pengembangan | Anggota |
| | Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Anggota |
| | Kasubag Program dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada DPMPTSP | Anggota |
| | | |
| **13.** | **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH** | |
| | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan | Anggota |
| | Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan | Anggota |
| | Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi | Anggota |
| | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro | Anggota |
| | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubbag Keuangan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Koperasi | Anggota |
| | Fungsional Penera | Anggota |
| | Fungsional Analis Perdagangan | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Perdagangan | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Koperasi | Anggota |
| | Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Anggota |
| | | |
| **14.** | **DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA** | |
| | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Sekretaris |
| | Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri | Anggota |
| | Kabid Sarana dan Prasarana Industri | Anggota |
| | Kabid Ketenagakerjaan | Anggota |
| | Kabid Transmigrasi | Anggota |
| | Kasubag Program dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Anggota |
| | Fungsional Pengantar Kerja | Anggota |
| | Fungsional Mediator Hubungan Industrial | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Anggota |
| | | |
| **15.** | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | |
| | Kepala Diskominfo | Ketua |
| | Sekretaris Diskominfo | Sekretaris |
| | Kabid Komunikasi Publik | Anggota |
| | Kabid Aplikasi Informatika | Anggota |
| | Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik | Anggota |
| | Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik | Anggota |
| | Kasubag Program dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada Diskominfo | Anggota |
| | | |
| **16.** | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA** | |
| | Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | Sekretaris |
| | Kasubag Program dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Kabid Pariwisata | Anggota |
| | Kabid Pemuda | Anggota |
| | Kabid Olahraga | Anggota |
| | Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | Anggota |
| | | |
| **17.** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI** | |
| | Kepala DPMD/N | Ketua |
| | Sekretaris DPMD/N | Sekretaris |
| | Kabid Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kabid Pemerintahan Nagari | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari | Anggota |
| | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada DPMD/N | Anggota |
| | | |
| **18.** | **DINAS PERHUBUNGAN** | |
| | Kepala Dinas Perhubungan | Ketua |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Sekretaris Dinas Perhubungan | Sekretaris |
| | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | Anggota |
| | Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan | Anggota |
| | Kepala Bidang Prasarana | Anggota |
| | Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Perhubungan | Anggota |
| | | |
| **19.** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | |
| | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Sekretaris |
| | Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan | Anggota |
| | Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Anggota |
| | Fungsional Analis Lingkungan Hidup | Anggota |
| | Fungsional Analis Sistem Mutu dan Lingkungan | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| | | |
| **20.** | **DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN** | |
| | Kepala Distanhortbun | Ketua |
| | Sekretaris Distanhortbun | Sekretaris |
| | Kabid Sarana | Anggota |
| | Kabid Prasarana | Anggota |
| | Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha | Anggota |
| | Kabid penyuluhan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kasubag Umum Dan Kepegawaian | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Benih | Anggota |
| | Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Penyuluh Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Umum | Anggota |
| | | |
| **21.** | **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | |
| | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Sekretaris |
| | Kabid Perbibitan dan Produksi | Anggota |
| | Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran | Anggota |
| | Kabid. Sarana dan Prasarana | Anggota |
| | Kabid Penyuluhan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Fungsional Analis Keuangan Pusat/ Daerah | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak | Anggota |
| | Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Anggota |
| | Fungsional Penyuluh Pertanian | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota |
| | | |
| **22.** | **DINAS PERIKANAN** | |
| | Kepala Dinas Perikanan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Perikanan | Sekretaris |
| | Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan | Anggota |
| | Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan | Anggota |
| | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Perikanan | Anggota |
| | | |
| **23.** | **DINAS PANGAN** | |
| | Kepala Dinas Pangan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Pangan | Sekretaris |
| | Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Anggota |
| | Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Pangan | |
| | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pangan | Anggota |
| | | |
| **24.** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | |
| | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Ketua |
| | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Sekretaris |
| | Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| | Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| | Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Fungsional Pustakawan | Anggota |
| | Fungsional Arsiparis | Anggota |
| | Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan | Anggota |
| | | |
| **25.** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | |
| | Kepala Bappelitbangda | Ketua |
| | Sekretaris Bappelitbangda | Sekretaris |
| | Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| | Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda | Anggota |
| | Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda | Anggota |
| | Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda | Anggota |
| | Kasubag Program Bappelitbangda | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Bappelitbangda | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi | Anggota |
| | Pelaksana pada Bappelitbangda | Anggota |
| | | |
| **26.** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM** | |
| | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ketua |
| | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Sekretaris |
| | Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN | Anggota |
| | Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS | Anggota |
| | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Pelaksana pada BKPSDM | Anggota |
| | | |
| **27.** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH** | |
| | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Ketua |
| | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Sekretaris |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD) | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kabid Perencanaan Anggaran Daerah | Anggota |
| | Kabid Perbendaharaan Daerah | Anggota |
| | Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah | Anggota |
| | Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | Anggota |
| | Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah | Anggota |
| | Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Anggota |
| | | |
| **28.** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | |
| | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Ketua |
| | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris |
| | Kabid Ideologi dan Wasbang | Anggota |
| | Kabid Politik Dalam Negeri | Anggota |
| | Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat | Anggota |
| | Fungsional Perencana | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Anggota |
| | Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan | Anggota |
| | Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota |
| | | |
| **29.** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | |
| | Kepala Pelaksana BPBD | Ketua |
| | Sekretaris BPBD | Sekretaris |
| | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Anggota |
| | Kabid Kedaruratan dan Logistik | Anggota |
| | Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Anggota |
| | Kasubag Program dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Pelaksana pada BPBD | Anggota |
| | | |
| **30.** | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS** | |
| | Direktur RSUD dr. Achmad Darwis | Ketua |
| | Kabag Tata Usaha | Sekretaris |
| | Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik | Anggota |
| | Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan | Anggota |
| | Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan | Anggota |
| | Kasi Sarana Prasarana dan Logistik | Anggota |
| | Kasi Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |
| | Kasi Pelayanan Penunjang Medis | Anggota |
| | Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan | Anggota |
| | Kasi Pelayanan Medis | Anggota |
| | Kasi Pelayanan Keperawatan | Anggota |
| | Kasubag Keuangan | Anggota |
| | Kasubag Umum dan Humas | Anggota |
| | Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Anggota |
| | Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis | Anggota |
| | | |
| **31.** | **KECAMATAN GUGUAK** | |
| | Camat Guguak | Ketua |
| | Sekretaris Camat Guguak | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Guguak | Anggota |
| | | |
| **32.** | **KECAMATAN PAYAKUMBUH** | |
| | Camat Payakumbuh | Ketua |
| | Sekretaris Camat Payakumbuh | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh | Anggota |
| | | |
| **33.** | **KECAMATAN MUNGKA** | |
| | Camat Mungka | Ketua |
| | Sekretaris Camat Mungka | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Mungka | Anggota |
| | | |
| **34.** | **KECAMATAN SULIKI** | |
| | Camat Suliki | Ketua |
| | Sekretaris Camat Suliki | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Suliki | Anggota |
| | | |
| **35.** | **KECAMATAN BUKIK BARISAN** | |
| | Camat Bukik Barisan | Ketua |
| | Sekretaris Camat Bukik Barisan | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan | Anggota |
| | | |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **36.** | **KECAMATAN GUNUANG OMEH** | |
| | Camat Gunuang Omeh | Ketua |
| | Sekretaris Camat Gunuang Omeh | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh | Anggota |
| | | |
| **37.** | **KECAMATAN LUAK** | |
| | Camat Luak | Ketua |
| | Sekretaris Camat Luak | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Luak | Anggota |
| | | |
| **38.** | **KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN** | |
| | Camat Lareh Sago Halaban | Ketua |
| | Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban | Sekretaris |
| | Kasubag Umun dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksanan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban | Anggota |
| | | |
| **39.** | **KECAMATAN HARAU** | |
| | Camat Harau | Ketua |
| | Sekretaris Camat Harau | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Harau | Anggota |
| | | |
| **40.** | **KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI** | |
| | Camat Situjuah Limo Nagari | Ketua |
| | Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari | Anggota |
| | | |
| **41.** | **KECAMATAN AKABILURU** | |
| | Camat Akabiluru | Ketua |
| | Sekretaris Camat Akabiluru | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru | Anggota |
| | | |
| **42.** | **KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU** | |
| | Camat Pangkalan Koto Baru | Ketua |
| | Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru | Anggota |
| | | |
| **43.** | **KECAMATAN KAPUR IX** | |
| | Camat Kapur IX | Ketua |
| | Sekretaris Camat Kapur IX | Sekretaris |
| | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi | Anggota |
| | Kepala Seksi Pemerintahan | Anggota |
| | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban | Anggota |
| | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota |
| | Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX | Anggota |

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**